



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## KRISIS PANGAN: KOMITMEN G20 DAN UPAYA INDONESIA MENGATASINYA

**Sri Nurhayati Qodriyatun**

Analisis Legislatif Ahli Madya

[sri.qodriyatun@dpr.go.id](mailto:sri.qodriyatun@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi keberlanjutan hidup manusia. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jika pangan tidak tersedia, maka kondisi kehidupan manusia akan terancam. Hak atas pangan dijamin dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Ekosob. Hak atas pangan juga dinyatakan dalam konstitusi kita UUD 1945 dan dalam UU Pangan. Hak atas pangan mencakup tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan kelayakan. Oleh karena itu, ketika hak pangan dijamin dalam Kovenan Ekosob dan dalam konstitusi maka tiga pilar hak atas pangan harus dijadikan dasar dalam memenuhi hak pangan tersebut.

Berdasarkan laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022* yang disusun oleh lima lembaga di bawah PBB disampaikan bahwa angka kelaparan penduduk dunia mencapai 828 juta orang di tahun 2021. Angka ini lebih tinggi 46 juta orang dibandingkan tahun 2020 dan meningkat 150 juta orang dibandingkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. PBB juga memprediksi jumlah angka kelaparan pada 2030 mendatang akan lebih dari 670 juta orang dan angka ini jauh di atas target program *zero hunger*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hak pangan sekian juta penduduk dunia tidak terpenuhi, krisis pangan global terjadi.

Dalam puncak perhelatan KTT G20 di Bali tanggal 15 - 16 November 2022, isu krisis pangan telah menjadi perhatian bersama, selain krisis energi dan transformasi digital. Terlebih saat ini dunia tengah menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga usai, ditambah perang dan ketegangan geopolitik (konflik Rusia dan Ukraina) masih terus terjadi. Dibutuhkan tindakan mendesak, terutama dari anggota G20, negara-negara dengan perekonomian terbesar, untuk memastikan bencana kelaparan tidak terjadi. KTT G20 melahirkan beberapa komitmen bersama dalam mengatasi krisis pangan global. *Pertama*, negara-negara anggota G20 menyepakati tidak adanya pembatasan ekspor produk pangan dan pupuk. Kesepakatan ini sebagai tindak lanjut atas keprihatinan negara-negara anggota G20 terhadap krisis pangan yang terjadi akibat gejolak geopolitik. Untuk itu, perlu ada pembaruan pertanian global, aturan perdagangan, dan fasilitasi perdagangan produk pertanian dan makanan. *Kedua*, KTT G20 berkomitmen untuk memastikan pasokan pangan berkelanjutan, menjaga akses terhadap sumber makanan lokal, serta memastikan ketersediaan pupuk. Terutama bagi negara-negara berkembang dan negara miskin. Ini berarti kesepakatan *Black Sea Grain Initiative* dilanjutkan. *Black Sea Grain Initiative* merupakan kesepakatan yang dibangun antara Rusia dan Ukraina dengan bantuan Turki dan PBB untuk menjamin pengiriman gandum dari Ukraina dan pengiriman pupuk dari Rusia melalui Pelabuhan Laut Hitam. Pada mulanya, kesepakatan ini hanya akan berlaku hingga 19 November 2022 dan melalui momen KTT G20 kesepakatan ini akan terus diberlakukan hingga satu tahun ke depan untuk menjamin pasokan gandum dan pupuk, terutama bagi negara-negara berkembang.

Pada hakikatnya, Indonesia pun tidak terlepas dari isu krisis pangan global. *The Economist Intelligence Unit* mencatat *Global Food Security Index* Indonesia berada di peringkat 37 dari 113 negara dalam kategori ketersediaan, peringkat 54 dalam kategori keterjangkauan, dan

peringkat 95 dalam kategori kualitas dan keamanan serta keragaman pangan. Perlu ada langkah-langkah penguatan mekanisme ketahanan pangan. Upaya yang telah dilakukan Indonesia adalah dengan menyediakan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih, kredit dan berbagai input lainnya. Upaya terbaru adalah dengan membangun *food estate* (lumbung pangan) yang dilakukan lintas kementerian, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berbagai kementerian tersebut bekerja sama untuk menjalankan pengembangan *food estate* yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2020 – 2024.

Dalam perspektif ekonomi makro, peningkatan produktivitas pangan melalui program *food estate* akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas pangan melalui *food estate* dapat menghindarkan Indonesia dari ketergantungan terhadap produk impor pangan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri. Namun, upaya pengembangan *food estate* belum menyelesaikan masalah keterjangkauan pangan dan kelayakan pangan (aman dan bergizi) karena hak pangan itu tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga akses pangan dan kelayakan pangan. Perlu ada upaya lain agar pemenuhan hak pangan rakyat Indonesia terpenuhi sehingga tiga pilar hak pangan, yaitu ketersediaan, akses, dan kelayakan terwujud.

## Atensi DPR

Menjamin hak pangan rakyat Indonesia, baik dari sisi ketersediaan, akses, dan kelayakan pangan merupakan kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk membangun ketahanan pangan nasional yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pangan. Akan tetapi, juga membangun kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga setiap individu masyarakat dapat mengakses pangan yang terjangkau secara ekonomi, aman, dan bergizi untuk dikonsumsi. Selain itu, pengembangan teknologi pertanian, teknologi pangan, dan diversifikasi pangan diperlukan. Diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal yang selama ini banyak dikonsumsi atau dikembangkan masyarakat. DPR RI juga mengapresiasi pemerintah yang telah mengangkat isu krisis pangan ini menjadi bagian isu yang dibicarakan bersama dengan negara-negara G20 sehingga melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang mendukung bagi pembangunan pangan di Indonesia.

## Sumber

antaranews.com, 14 November 2022;  
indonesia.go.id, 15 November 2022;  
kompas.com, 14 & 15 November 2022;  
republikca.co.id, 16 November 2022;  
Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian, 12 November 2022; dan  
tempo.co, 14 & 16 November 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Ari Muliarta Ginting  
Edmira Rivani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.